

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mendorong percepatan signifikan dalam sektor perdagangan, terutama melalui kemunculan perdagangan elektronik (*e-commerce*). Meluasnya penetrasi internet, penggunaan smartphone, serta ekosistem pembayaran digital yang semakin matang telah memperkuat pertumbuhan nilai pasar *e-commerce* di Indonesia. Laporan dari *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF, 2024) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki nilai pasar *e-commerce* yang besar, dengan proyeksi pertumbuhan dua digit dalam beberapa tahun kedepan.

Perubahan perilaku belanja masyarakat turut mempertegas posisi *e-commerce* sebagai saluran utama transaksi. Pandemi COVID-19 mempercepat pergeseran kebiasaan berbelanja dari offline ke *online*, karena konsumen kini lebih mengutamakan kemudahan akses, kemampuan membandingkan harga, layanan pengantaran ke rumah, serta berbagai insentif promosi yang ditawarkan platform digital. Hasil kajian literatur dan beberapa studi kualitatif mengonfirmasi adanya peningkatan preferensi belanja *online* pasca-pandemi, dengan proporsi konsumen yang melaporkan frekuensi pembelian daring lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi (Fauzo, Fauzan, & Umar, 2018).

Perkembangan pesat *e-commerce* tersebut membawa konsekuensi nyata bagi pedagang toko offline dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tradisional.

Di satu sisi, integrasi ke dalam ekosistem digital membuka peluang perluasan pasar. Namun di sisi lain, banyak pedagang fisik yang mengalami penurunan jumlah pelanggan, tekanan kompetitif terhadap harga, serta kesulitan bersaing dalam hal kenyamanan dan variasi produk. Berbagai penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa pedagang konvensional yang belum mampu beradaptasi secara digital mengalami penurunan kinerja penjualan, sementara mereka yang telah memanfaatkan platform digital justru memperoleh peningkatan eksposur dan omzet.

Selain faktor perilaku konsumen dan kemampuan teknologi, terdapat pula tantangan struktural yang memengaruhi kemampuan adaptasi pedagang offline, seperti keterbatasan modal, rendahnya literasi digital, infrastruktur logistik yang belum optimal, serta regulasi yang masih berkembang terkait perdagangan digital. Pemerintah pusat dan daerah telah meluncurkan berbagai program digitalisasi UMKM dan kebijakan pendukung lainnya, namun tingkat adopsi antar wilayah dan antar-sektor masih menunjukkan kesenjangan yang cukup lebar sehingga menimbulkan ketimpangan dampak ekonomi.

UMKM merupakan sektor penting dalam perekonomian daerah, termasuk di Kota Banjar, Jawa Barat. Keberadaan pedagang kecil dan menengah tidak hanya berperan dalam penyediaan lapangan kerja, tetapi juga menjadi tulang punggung kegiatan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data Pemerintah Kota Banjar (Rafand

et al., 2024), pada tahun 2015 tercatat sebanyak 167 perusahaan kecil dan 38 perusahaan menengah yang beroperasi di sektor perdagangan, tersebar di empat kecamatan utama. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor perdagangan masih menjadi elemen dominan dalam struktur ekonomi lokal.

Namun demikian, di tengah perkembangan teknologi yang pesat, pedagang kecil dan menengah di Kota Banjar menghadapi berbagai tantangan struktural dan adaptif yang dapat menghambat keberlanjutan usaha mereka. Tantangan tersebut meliputi aspek permodalan, digitalisasi, persaingan pasar modern, hingga keterbatasan infrastruktur dan kebijakan pendukung. Dalam situasi ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis.

Dinamika kebijakan strategi pemerintah daerah dalam menghadapi digitalisasi menjadi hal yang sangat krusial. Pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan akselerator dalam membantu pelaku usaha bertransformasi menuju sistem perdagangan digital. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, kebutuhan pasar, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal. Oleh karena itu, strategi pemerintah harus bersifat dinamis, adaptif, dan kolaboratif agar mampu menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang dari perkembangan *e-commerce*.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (KUKMP) Kota Banjar sebagai instansi yang memiliki kewenangan di bidang pembinaan dan pemberdayaan UMKM memiliki peran sentral dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis tersebut. Dinamika kebijakan yang diterapkan Dinas KUKMP mencakup upaya pemberdayaan UMKM, peningkatan literasi digital, fasilitasi kerja sama dengan platform *e-commerce*, serta penguatan tata kelola kelembagaan. Melalui strategi yang terus disesuaikan dengan perkembangan zaman, pemerintah daerah berupaya mewujudkan ekosistem perdagangan yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di era digital.

Salah satu persoalan utama adalah keterbatasan akses terhadap modal usaha. Banyak pedagang kecil di Banjar yang masih bergantung pada bantuan program pemerintah seperti Program Berdaya Lokal, yang bertujuan memperkuat permodalan UMKM. Namun realisasi bantuan tersebut sering mengalami keterlambatan, menyebabkan pelaku usaha mengalami kesulitan dalam menjaga keberlangsungan operasionalnya (Insiden24, 2024). Minimnya akses terhadap lembaga perbankan serta belum optimalnya sistem pembiayaan mikro juga menjadi hambatan serius bagi pengembangan skala usaha.

Selain itu, rendahnya literasi digital dan kemampuan adaptasi teknologi menjadi kendala signifikan. Pemerintah daerah sebenarnya telah berupaya melalui inisiatif seperti Launching Go Digital UMKM Bulak Sawah yang ditujukan untuk mendorong transformasi digital. Namun, sebagian besar pelaku UMKM di Kota Banjar masih belum terbiasa menggunakan platform *e-commerce* atau media sosial

untuk promosi dan transaksi (banjarkota.go.id, 2024). Kurangnya pelatihan dan pendampingan menjadikan banyak pedagang belum mampu memanfaatkan peluang digitalisasi secara optimal.

Tantangan lainnya berasal dari persaingan pasar modern dan platform digital. Meskipun produk-produk UMKM Kota Banjar telah mulai memasuki toko modern, tidak sedikit pedagang yang mengalami kesulitan memenuhi persyaratan legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, dan izin edar PIRT. Prosedur administrasi yang kompleks dan biaya sertifikasi menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha kecil (Tasikmalaya iNews, 2024). Sementara itu, pedagang di pasar tradisional menghadapi penurunan jumlah pembeli akibat pergeseran preferensi konsumen menuju pasar modern dan belanja online.

Masalah infrastruktur pasar dan tata kelola kebijakan juga menjadi isu penting. Beberapa pasar tradisional di Kota Banjar menghadapi persoalan fasilitas, retribusi, serta keberadaan kios yang berdiri di area sempadan sungai yang berpotensi ditertibkan (Times Indonesia, 2024). Di sisi lain, adanya laporan pungutan liar (pungli) dalam kegiatan perdagangan menandakan bahwa transparansi kebijakan masih perlu diperkuat agar tidak menambah beban bagi pedagang kecil (Wakhid Abdul, Qohar, & Faizal, 2022).

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa pedagang kecil dan menengah di Kota Banjar masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengembangkan usahanya, baik dari sisi internal (keterbatasan modal dan

kemampuan digital) maupun eksternal (regulasi, infrastruktur, dan persaingan pasar). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai strategi pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan digitalisasi perdagangan, agar dapat dirumuskan kebijakan yang tepat untuk memperkuat daya saing sektor perdagangan lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah, khususnya Dinas KUKMP Kota Banjar, serta pelaku UMKM dalam merancang program pemberdayaan yang berkelanjutan.

Perubahan ekonomi global dan domestik yang semakin terdigitalisasi membawa tekanan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah dan pelaku UMKM. Di satu sisi, konsumen kini memiliki akses yang lebih mudah terhadap produk melalui platform digital. Disisi lain, pelaku usaha tradisional harus beradaptasi dengan cepat agar tetap relevan dalam persaingan. Dalam konteks tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (KUKMP) memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah yang berfungsi memfasilitasi adaptasi pelaku usaha lokal terhadap tantangan digitalisasi ekonomi.

Di Kota Banjar, Dinas KUKMP telah mengambil sejumlah langkah konkret dalam menghadapi transformasi digital. Salah satunya melalui program Digitalisasi UMKM Juara (2022) yang melibatkan 150 pelaku UMKM pemula untuk mengikuti pelatihan branding digital dan implementasi QRIS. Program tersebut menunjukkan kesadaran Pemerintah Daerah terhadap pentingnya digitalisasi dalam memperluas daya saing UMKM lokal.

Selain itu, Dinas KUKMP juga menginisiasi program Pasar Cerdas (Cekat, Responsif, Digital, Aman, dan Sejahtera) yang diluncurkan pada Agustus 2025. Program ini merupakan inovasi dalam mentransformasikan pasar tradisional menuju ekosistem perdagangan yang lebih modern dan digital, sejalan dengan tuntutan konsumen masa kini yang mengedepankan efisiensi, kenyamanan, dan layanan berbasis teknologi. Langkah lain yang dilakukan adalah penyelenggaraan sosialisasi dan pelatihan digital marketing bagi pedagang pasar tradisional. Melalui kegiatan ini, pedagang diharapkan mampu menggunakan media sosial, platform digital, dan strategi pemasaran daring untuk memperluas jangkauan konsumen dan meningkatkan omzet.

Namun demikian, berbagai kendala masih dihadapi, antara lain rendahnya literasi digital di kalangan pedagang kecil, ketimpangan infrastruktur jaringan internet, keterbatasan sumber daya manusia pengelola program, serta kebutuhan regulasi dan pendampingan yang lebih sistematis agar digitalisasi tidak hanya menjadi proyek jangka pendek. Tanpa penguatan strategi yang berkelanjutan, terdapat risiko ketergantungan pada metode konvensional yang kurang kompetitif di tengah era perdagangan digital.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis strategi Pemerintah Daerah melalui Dinas KUKMP Kota Banjar dalam menghadapi tantangan digitalisasi perdagangan di era *e-commerce*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan kebijakan publik, pemberdayaan ekonomi daerah, dan percepatan transformasi digital yang inklusif serta berkelanjutan.

Pemerintah daerah mempunyai posisi strategis dalam menjaga keseimbangan antara kedua sektor ini agar pertumbuhan digital tidak menyebabkan tergerusnya sektor tradisional yang selama ini menjadi penopang ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat. Kebijakan dan strategi lokal yang efektif dapat mengurangi dampak negatif, sekaligus memastikan seluruh pelaku usaha mendapatkan manfaat dari transformasi ekonomi (Triastuti 2021).

Beberapa alasan mengapa kebijakan strategis pemerintah daerah sangat penting dalam konteks menjaga keseimbangan antara sektor tradisional dan digital:

1. Pelindungan dan Revitalisasi Pasar Tradisional

Banyak penelitian menunjukkan bahwa pasar tradisional, yang dari aspek kultural dan sosial memiliki peran penting, mengalami penurunan daya saing di hadapan pasar modern dan digital. Kebijakan daerah yang berfokus pada peningkatan fasilitas pasar tradisional (infrastruktur, kebersihan, kenyamanan), regulasi izin usaha modern, dan proteksi lokasi ritel modern menjadi sangat penting agar pasar tradisional tetap eksis.

2. Pemerataan Manfaat Digitalisasi

Digitalisasi dapat memperluas peluang usaha, namun bila tidak diimbangi dengan kesiapan SDM, akses infrastruktur, dan regulasi yang adil, akan muncu kesenjangan antar pelaku usaha. Pelaku usaha tradisional di daerah tertinggal atau pedalaman bisa tertinggal karena minim akses internet atau kurangnya literasi digital. Pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang menjamin inklusi digital, pelatihan, dan pendampingan agar semua dapat ikut serta dalam ekonomi digital dengan adil.

3. Pengaturan Izin Usaha dan Regulasi Persaingan yang Sehat

Kebijakan mengenai izin usaha ritel modern, tata letak pasar, regulasi zonasi, retribusi, dan persyaratan legal bagi usaha tradisional dan digital sangat menentukan keseimbangan. Tanpa regulasi yang bijak, ritel modern bisa mendominasi sepenuhnya dan usaha tradisional

kehilangan ruang usaha. Kajian di Pangkal Pinang, misalnya, menunjukkan bahwa izin usaha ritel modern mempengaruhi omzet dan kelangsungan usaha retail tradisional.

4. Adaptasi dan Transformasi Pedagang Tradisional

Untuk menjaga agar pedagang tradisional juga berdaya saing, pemerintah daerah perlu menyediakan strategi transformasi usaha: pelatihan digital, fasilitas penjualan online, kemitraan platform digital, subsidi atau insentif, serta program pemberdayaan yang memberi akses pembiayaan dan pasar baru. Kebijakan semacam ini harus dirancang agar tidak membebani usaha kecil dan tetap mempertahankan budaya usaha tradisional.

5. Kesejahteraan Sosial dan Dampak Ekonomi Lokal

Usaha tradisional seringkali mempekerjakan tenaga lokal, menjadi pusat interaksi sosial ekonomi di komunitas, dan menjaga keberlanjutan ekonomi lokal.

Apabila usaha tradisional runtuh tanpa kebijakan kompensasi atau pengganti yang memadai, akan muncul dampak negatif seperti pengangguran lokal, penurunan pendapatan masyarakat kecil, dan degradasi kehidupan sosioekonomi lokal. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara digital dan tradisional juga menjadi aspek keadilan sosial dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Penelitian dalam konteks kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan daerah memiliki peranan penting untuk memastikan bahwa intervensi-pemerintah diarahkan secara efektif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mampu menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan. Di era digital dan transformasi ekonomi, penelitian seperti ini menjadi semakin krusial karena perubahan yang cepat, kompleksitas stakeholder, dan tuntutan akuntabilitas publik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan terhadap latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini:

Bagaimana Strategi Pemerintah Daerah Melalui Dinas KUKMP Kota Banjar Dalam Menghadapi Tantangan Digitalisasi perdagangan Di era *E- Commerce*?

1.3 Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus penelitian agar tidak terlalu luas, penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (KUKMP) Kota Banjar dalam menghadapi tantangan digitalisasi perdagangan di era *e-commerce*.

Penelitian ini secara khusus menyoroti periode kepemimpinan Ir. Sudarsono dan Dr. Hj. Supriana, M.Si, yang menjadi representasi dari dinamika kebijakan dan perubahan strategi pemerintah daerah dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan ekonomi digital.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini tidak berupaya membahas seluruh aspek perdagangan digital secara teknis, seperti sistem transaksi online, logistik, atau infrastruktur teknologi, melainkan berfokus pada dimensi kebijakan, program, dan strategi pemerintah daerah dalam mendukung pedagang toko offline agar mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis digital.

Batasan ini juga mencakup upaya-upaya strategis yang dilakukan oleh Dinas KUKMP Kota Banjar, seperti pemberdayaan pelaku usaha melalui pelatihan literasi digital, fasilitasi promosi dan pemasaran berbasis digital, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pihak swasta. Selain itu, penelitian ini hanya mencakup rentang waktu tahun 2025 hingga 2030, sebagai periode aktif kebijakan dan program Dinas KUKMP di bawah kepemimpinan Ir. Sudarsono dan Dr. Hj. Supriana, M.Si.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada dinamika strategi dan kebijakan pemerintah daerah yang terus berkembang seiring dengan perubahan lingkungan ekonomi digital, serta bagaimana implementasi kebijakan tersebut berperan dalam membantu pedagang

toko offline untuk bertransformasi dan bertahan di tengah kompetisi *e-commerce* yang semakin ketat.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan Untuk :

1. Menganalisis strategi dan kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (KUKMP) Kota Banjar dalam menghadapi tantangan digitalisasi perdagangan di era *e-commerce*.
2. Menggambarkan dinamika perubahan strategi kebijakan yang terjadi pada periode kepemimpinan Ir. Sudarsono dan Dr. Hj. Supriana, M.Si, serta bagaimana kebijakan tersebut beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelaku usaha lokal.
3. Mengidentifikasi program-program strategis yang dilakukan Dinas KUKMP Kota Banjar untuk mendukung pedagang toko offline agar mampu beradaptasi dan bersaing dalam sistem perdagangan berbasis digital.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu pemerintahan dan kebijakan publik, khususnya dalam memahami dinamika strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam merespons tantangan digitalisasi ekonomi. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi akademik dalam penerapan teori tata kelola pemerintahan (*governance*) di tingkat daerah.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas KUKMP Kota Banjar dalam merumuskan dan mengembangkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan digital, terutama untuk mendukung keberlanjutan pedagang toko offline.

Selain itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pelaku UMKM dan masyarakat Kota Banjar agar lebih siap menghadapi transformasi ekonomi digital secara inklusif dan berdaya saing.